

KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT: Kisah Berkembangnya Batik Bantul

Pajar Hatma Indra Jaya¹

Abstrak

Batik banyak diproduksi oleh pengusaha skala rumah tangga di Bantul. Meskipun batik merupakan warisan budaya yang tak ternilai, namun usaha batik mengalami pasang surut sehingga membutuhkan rekayasa sosial untuk mengembalikan kejayaan batik. Perubahan sosial budaya yang terjadi di Yogyakarta memperlihatkan pakaian batik tidak lagi digunakan sebagai pakaian sehari-hari, hanya wanita tua jawa yang masih menggunakan batik (tapih) sebagai pakaian sehari-hari, dengan demikian batik akan hilang seiring matinya generasi tua. Alih generasi batik (tapih) sebagai pakaian sehari-hari tidak berjalan mulus, terjadilah pemudaran cara berpakaian orang jawa sehingga permintaan akan batik berkurang. Jika permintaan batik berkurang maka usaha batik akan mengalami masalah. Rekayasa sosial berupa kebijakan mempunyai peran yang signifikan dalam menyelamatkan usaha batik. Hal ini nampak dari perkembangan sentra industri batik di Bantul yang berkembang pesat sejak tahun 2007. Pemkab Bantul mengeluarkan kebijakan guna membangkitkan usaha batik dengan cara rekayasa pasar menjadikan batik sebagai pakaian dinas pegawai di Bantul. Sejak tahun 2007 Pemkab Bantul mewajibkan setiap PNS menggunakan pakaian batik seminggu dua kali. Tidak hanya membuka pasar, Pemkab Bantul juga berusaha melestarikan ketrampilan batik dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Bantul No. 05 A tahun 2010 yang menjadikan batik sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di sekolah dasar sehingga keahlian membatik akan bertahan di Bantul.

Kata Kunci: *Perubahan Sosial Budaya, Perkembangan Batik, Kebijakan, Rekayasa Pasar.*

¹ Dr. Pajar Hatma Indra Jaya adalah pengajar mata kuliah analisis problem sosial di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga. Mempunyai alamat email papinmbantul@yahoo.com.

A. Pendahuluan

Jika dahulu membicarakan batik maka stok pengetahuan akan memunculkan kota-kota seperti Surakarta, Yogyakarta, Pekalongan, dan Cirebon, namun saat ini makin banyak lagi nama kota yang muncul ketika menyebut batik. Salah satu kota yang fenomenal perkembangan batiknya adalah Bantul dengan corak batik bantulan². Saat ini, di Bantul terdapat 52 pengusaha batik dengan 781 pengrajin,³ padahal tahun 1994 baru terdapat 34 pengusaha batik yang mempekerjakan 291 pengrajin.⁴

Apakah pertumbuhan jumlah pengrajin batik ini muncul secara alamiah, atautkah perkembangan ini terjadi karena rekayasa terencana. Menilik perkembangan batik sekitar tahun 2000-an, banyak pengusaha batik gulung tikar karena maraknya impor kain dari Cina, naiknya harga bahan baku batik yang masih harus diimpor,⁵ dan berkembangnya industri tekstil nasional. Selain itu, tekanan terhadap batik tulis dan batik cap telah nampak ketika munculnya batik printing pada tahun 80-an.⁶

Khusus untuk pengrajin batik di wilayah Bantul, bencana gempa bumi tahun 2006 menambah berat persoalan para

² Perlu dibedakan antara batik bantul dengan batik corak bantulan. Istilah pertama mengacu pada entitas kewilayahan, sedangkan istilah kedua dimaknai sebagai salah satu corak dari jenis batik. Penjelasan lebih lanjut ada di salah satu sub-bab dalam tulisan ini (Sub-bab dengan judul Batik Bantul/Batik Bantulan).

³ Diolah dari tulisan Riyantono, dkk (2010) pada halaman 65 sampai 95 tentang profil pengrajin batik di wilayah Bantul.

⁴ Pada waktu itu, pengusaha batik terbanyak di DI Yogyakarta berada di Kota Yogyakarta yang berjumlah 60 dengan 499 orang tenaga kerja. Sedangkan di Kabupaten Gunungkidul terdapat 48 pengusaha batik, namun hanya mempekerjakan 60 orang (PIKM DIY, *Katalog Batik Khas Yogyakarta*, Kanwi Dept./Dinas Perindustrian Propinsi DIY, Yogyakarta, 1996, hal 3). Saat ini, di Kecamatan Imogiri saja terdapat 19 pengusaha batik dengan jumlah pekerja sekitar 581 orang.

⁵ Hal ini terjadi karena naiknya kurs dolar ketika krisis moneter tahun 1998.

⁶ Pada sekitar tahun 1980-an, sebagian pengusaha batik cap dan tulis di Surakarta terpaksa harus tutup karena munculnya pabrik batik printing yang mampu memproduksi batik dengan jumlah banyak dalam waktu cepat. Sebagai perbandingan, pembuatan satu batik cap membutuhkan waktu tiga minggu sampai satu bulan, 10 batik cap dapat dihasilkan dalam waktu satu hari, sedangkan batik printing dapat menghasilkan puluhan ribu lembar dalam waktu satu hari. Lihat tulisan Nurhadiantomo, *Konflik-Konflik Sosial Pri dan Non Pri dan Hukum Keadilan Sosial*, UMS Press, 2004, hal 196 dan Mahendra Wijaya, *Ekonomi Komersial Ganda: Perkembangan Kompleksitas Jaringan Sosial Ekonomi Perbatikan di Surakarta*, UNS Press, 2011, hal 65, 66.

pembatik. Beberapa rumah produksi batik di wilayah Kecamatan Pandak dan Imogiri roboh dan semangat untuk membatik turut hancur seiring rusaknya alat-alat produksi batik. Namun dengan sentuhan kebijakan, batik tidak “mati”, bahkan menunjukkan eksistensinya dan berpotensi besar sebagai pendorong perkembangan ekonomi masyarakat.

Bertahannya batik dalam tekanan tersebut mengindikasikan adanya perubahan sosial terencana dengan intervensi ataupun rekayasa sosial yang sistematis yang diatur oleh aktor-aktor tertentu. Tulisan ini akan melihat strategi intervensi yang dilakukan Pemkab Bantul dengan meninjau sejarah perkembangan batik bantul. Strategi apa yang dilakukan oleh Pemkab Bantul untuk melakukan pengembangan batik bantul.⁷

B. Kebijakan Sosial Yang Responsif Kunci Pengembangan Masyarakat

Kebijakan sosial dapat disamakan dengan kebijakan publik. Edi Soeharto (2010: 107) menjelaskan bahwa kebijakan adalah seperangkat tindakan (*course of action*), kerangka kerja (*framework*), petunjuk (*guideline*), rencana (*plan*), peta (*map*) atau strategi yang dirancang untuk menterjemahkan visi politis pemerintah atau lembaga pemerintah ke dalam program dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang kesejahteraan sosial. Jika mengacu pada *Kamus*

⁷ Tidak hanya batik, setelah reformasi banyak bidang di Bantul yang mengalami percepatan. Sebagai gambaran dalam makro ekonomi, pendapatan daerah Bantul mengalami lonjakan, dimana pada tahun 1997/1998 pendapatan Bantul baru mencapai 6,01 milyar, tahun 2002 berkembang menjadi 22,4 milyar, tumbuh menjadi 32,8 milyar pada tahun 2003, tahun 2009 bertambah menjadi 88,69 milyar dan saat ini telah meningkat menjadi menjadi 161 milyar (tahun 2012). Dilihat dari perkembangan kota, pertumbuhan Kota Yogyakarta tidak lagi hanya bergerak ke utara (baca Sleman), di bagian selatan (baca: Bantul) gairah pembangunan juga nampak. Pabrik dan perumahan bermunculan di Bantul. Dilihat dari prestasi dalam bidang pendidikan, peringkat nilai prestasi kelulusan di Bantul juga bersaing dengan Kota Yogyakarta. Beberapa kali prestasi siswa Bantul mengungguli prestasi siswa Kota Yogyakarta. Secara umum kebanggaan sebagai putra Bantul meningkat, masyarakat Bantul tidak lagi malu untuk menyebut alamatnya ketika berkenalan. www.bantulkab.go.id, Kontribusi *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Bantul*, <http://www.bantulkab.go.id/berita/1638.html>, diunduh 11 Januari 2013. Lihat juga Cungi Kusdarjito, *Program Pengentasan Kemiskinan*, 30 Mei 2007. <http://www.forplid.net/studi-kasus/8-kepemimpinan-kepemimpinan-/119-program-pengentasan-kemiskinan-.pdf>.

Besar Bahasa Indonesia, kebijakan dapat diartikan sebagai kepandaian, kemahiran, atau rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Kebijakan dapat juga diartikan sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.⁸ Secara lebih sederhana, kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari rekayasa sosial-intervensi sosial yang berisi seperangkat aturan atau garis pedoman untuk melaksanakan satu pekerjaan sebagai respon atas satu situasi guna mencapai tujuan secara cepat, efektif, dan efisien. Dalam kebijakan terkandung unsur 1). Otoritas yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan, 2). Aturan (prosedur) yang harus dilaksanakan, 3). Sanksi.

Mahfud (1998: 25) membagi kebijakan menjadi dua, yaitu kebijakan yang bersifat ortodoks dan kebijakan yang bersifat responsif. Kebijakan yang bersifat ortodoks merupakan kebijakan yang bercirikan positif-instrumental, yakni kebijakan yang difungsikan sebagai alat pelaksana ideology negara yang cenderung tertutup dari tuntutan kelompok atau masyarakat. Kebijakan ini bersifat *top down* yang disesuaikan dengan keinginan penguasa. Sedangkan kebijakan yang bersifat responsive adalah kebijakan yang muncul sebagai bagian dari keinginan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan ada yang hanya menguntungkan pembuat dan kroni-kroninya, namun ada juga kebijakan yang dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Studi Richard Robinson (1986) dan Yahya A. Muhaimin (1991) menemukan bahwa kaum kapitalis (pengusaha) di Indonesia bukan merupakan borjuis yang independen, akan tetapi mereka adalah para pejabat negara, perwira militer, keluarga, teman, dan pedagang Cina yang dekat dengan pejabat negara. Dengan kata lain kedua studi tersebut menengarai bahwa banyak munculnya pengusaha di Indonesia terjadi karena diuntungkan oleh kebijakan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan sosial yang diambil belum bersifat responsive guna memenuhi kebutuhan masyarakat.⁹

Kebijakan yang bersifat responsive merupakan kebijakan

⁸ <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>.

⁹ Lihat Hempri Suyatna, *Dominasi Elit Lokal Dalam Arena Pengembangan Industri Kecil Di Era Desentralisasi (Studi Kabupaten Banaran Provinsi Mataram)*, Ringkasan Disertasi, Program Doktor Sosiologi UGM, Yogyakarta, 2012.

yang mampu berdampak pada terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini antara lain nampak dari kebijakan Pemkab Bantul yang menggratiskan retribusi pasar tradisional dan pungutan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pasca gempa bumi tahun 2012. Kebijakan tersebut dibuat karena pemerintah melihat masyarakat sedang mengalami keterpurukan akibat bencana alam sehingga pemerintah perlu membantu, minimal dengan penggratiskan segala bentuk iuran negara agar mereka cepat bangkit dari keterpurukan.

Dilihat dari dampak atau tujuannya, kebijakan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan yang dibuat dengan maksud untuk menghambat perubahan, namun ada juga kebijakan yang dimaksudkan untuk mempercepat proses perubahan. Sebagai contoh, Pemkab Bantul mengeluarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penataan Toko Modern di Kabupaten Bantul. Kebijakan ini bertujuan untuk menghambat masuknya toko modern secara massif dan juga mall yang dikawatirkan akan meminggirkan pasar tradisional. Contoh lain dari kebijakan yang berusaha mempercepat target sasaran adalah “kebijakan benteng” pada tahun 1950 sampai 1957 yang dimaksudkan untuk mendorong naiknya kelas pengusaha “pribumi” Indonesia.¹⁰

Salah satu rekayasa kebijakan sosial yang dapat dilakukan terkait dengan batik adalah rekayasa pasar. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai upaya pemecahan masalah sosial dengan jalan melakukan percepatan perubahan yang mendorong perubahan alami menjadi perubahan terencana yang berjalan lebih cepat guna meningkatkan permintaan akan batik. Intervensi kebijakan ini punya karakter yang berbeda dengan perubahasan sosial evolusi yang berjalan lambat dan memerlukan waktu yang lama.

Dalam teori ekonomi, jumlah penawaran tergantung pada permintaan. Jika permintaan banyak maka produksi akan meningkat. Namun jika tidak ada permintaan maka produsen otomatis tidak akan memproduksi. Dalam kasus batik, jika tidak ada permintaan maka pengrajin tidak akan memproduksi. Jika tidak ada produksi maka tidak ada orang yang bekerja di batik. Jika tidak ada yang bekerja maka mereka tidak akan sejahtera. Jika tidak sejahtera dengan usaha batik maka ia

¹⁰ Salah satu isi dari “kebijakan benteng” adalah mewajibkan 70% dari pemegangan saham perusahaan harus dimiliki “bangsa Indonesia asli”.

akan menghentikan usaha batiknya dan beralih ke bidang lain. Jika tidak ada yang bekerja di sektor batik maka batik akan punah, padahal batik merupakan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu dibutuhkan intervensi pasar guna memperbanyak permintaan akan batik sehingga pengrajin sejahtera. Namun, jika pasar terbuka lebar, tetapi tidak ada produsen batik dapat menimbulkan masalah baru karena perlu mendatangkan barang dari daerah lain. Oleh karena itu, selain membuka pasar diperlukan upaya peningkatan ketrampilan sumber daya manusia Bantul dalam usaha batik sehingga tersedia tenaga kerja dan calon pengusaha-pengusaha baru.

C. Batik Bantul/Batik Bantulan

Batik berasal dari bahasa jawa "*mbatik*", yaitu *mbat* yang merupakan kependekan dari *ngembat* atau melontarkan dan *tik* yang merupakan kependekan dari titik sehingga batik diartikan sebagai melemparkan titik berkali-kali dalam selembar kain (Tim Sanggar Batik Barcode, 2010: 3). Selain itu ada yang mengartikan batik dari kata "*amba*" dan "*titik*" yang artinya menulis titik. Pengertian ini dibenarkan oleh para pembatik di Pijenan dan Pajimatan.

Istilah batik bantul atau lebih tepatnya disebut batik bantulan dimaknai sebagai kumpulan corak batik yang khas dari satu jenis batik, yaitu corak batik yang menjadikan keraton sebagai "*kiblat*" yang layak ditiru, namun tetap berusaha membedakan dengan karakter batik keraton Yogyakarta. Perbedaan ini terjadi secara sengaja sebagai penghormatan kepada keluarga keraton agar batik yang ada di masyarakat tidak sama persis dengan batik yang digunakan keluarga keraton. *Ora ilok* jika pakaian *kawula* sama dengan *gusti*-nya. Dengan demikian batik bantulan adalah batik kawula atau batiknya masyarakat biasa.¹¹

¹¹ Batik bantulan punya kaitan sejarah dengan Kerajaan Mataram, batik di Kerajaan Mataram punya kaitan dengan Masa Majapahit dan masa Majapahit punya kaitan dengan kebudayaan India. Cukup susah untuk menyebut darimana batik Indonesia pertama kali berasal. Beberapa sejarawan mengatakan batik berasal dari India, beberapa lagi mengatakan yang berasal dari India hanya pengaruh idenya. Sedangkan yang mengembangkan batik di Indonesia, termasuk filosofinya adalah bangsa Indonesia sendiri. Perlu dicatat juga bahwa daerah-daerah di Indonesia yang tidak bersinggungan dengan kebudayaan India, seperti Toraja dan Irian (Papua) juga mengenal batik (S.K. Sewan Susanto, 1980: 307).

Dilihat dari karakter fisik (baca warna), oleh karena “kiblat” batik bantulan adalah keraton maka batik bantulan juga menggunakan corak warna yang mirip dengan keraton Yogyakarta, yaitu warna-warna coklat, hitam, dan juga putih, namun batik bantulan sengaja dibuat lebih kasar dibandingkan dengan batik keraton. Batik bantulan sangat berbeda dengan karakter batik pekalongan dan juga Cirebon yang dominan warna-warna mencolok.

Selain itu alasan batik bantul tidak bisa dilepaskan dari batik keraton karena keraton pernah berada di Pleret Bantul sehingga produksi batik keraton juga dilakukan di Bantul. Selain itu banyak abdi dalem keraton yang berasal dari Bantul diberi ketrampilan membatik oleh keraton, karena mereka menetap di daerah Bantul maka corak yang mereka buat berkembang di Bantul. Sebagai contoh abdi dalem yang menjaga makam raja-raja di Pajimatan Imogiri akhirnya melahirkan batik klasik pajimatan.

Dalam buku *Batik Bantul*, Pemkab Bantul telah mendokumentasikan 53 motif batik asli Bantul. Meskipun perlu diberi catatan bahwa dari 53 motif batik asli bantul tersebut ada beberapa motif batik yang tidak mencerminkan atau “berkiblat” pada keraton karena menggunakan warna yang tidak lumrah, seperti motif irian yang menggunakan warna dasar oranye. Dengan demikian, batik bantul yang ada di buku tersebut lebih dimaknai sebagai batik yang dibuat oleh seniman yang tinggal di Bantul. Tulisan ini tidak akan membicarakan lebih lanjut perdebatan makna batik bantul sebagai corak, namun akan lebih fokus melihat proses perkembangan batik di wilayah Bantul.

D. Rekayasa Pasar

Batik awalnya merupakan pakaian tradisional Jawa, namun saat ini telah menjadi pakaian nasional. Tidak hanya orang bermata lebar dengan kulit sawo matang. Orang-orang Thionghoa saat ini juga biasa menggunakan batik. Meskipun demikian di tahun 90-an batik terasa mendapat tekanan hebat. Baju batik hanya digunakan di perayaan-perayaan tertentu. Bahkan tidak terjadi regenerasi pemakai batik untuk aktivitas sehari-hari.

Di era ini, batik tidak lagi digunakan oleh perempuan-perempuan Jawa untuk aktivitas sehari-hari. Padahal pada

zaman dulu perempuan jawa selalu mengenakan bawahan dalam bentuk *selendang* dan *tapih (jarik)*¹² sebagai pakaian harian atau ketika bepergian. Namun saat ini hal itu telah berubah, ketika mengamati pasar tradisional sebagai “habitat” perempuan jawa berjarik, wajah pasar mulai mengalami pemudaran. Hanya wanita tua yang berusia 60 tahun ke atas yang masih menggunakan batik sebagai penutup tubuh, sebagian yang lainnya telah beralih mengenakan rok dan celana panjang.¹³ Wanita generasi kelahiran 60-an atau sebelumnya (usia 50-an ke bawah) tidak lagi mengenakan *jarik*. *Jarik* hanya digunakan ketika menghadiri acara-acara adat, seperti pernikahan. Tidak praktis dan terkesan tidak modern menjadi bingkai yang membuat jaritan ditinggalkan. Untuk laki-laki, model pakaian tradisional jawa yang dibuat dari batik sudah lebih lama ditinggalkan dan hanya dikenakan ketika menghadiri perayaan. Padahal di masa lalu, para laki-laki jawa mengenakan ikat kepala yang dibatik dan juga *jarik* sebagai pakaian bawah.

Perubahan cara berpakaian orang jawa membuat permintaan pasar akan batik jauh berkurang, oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk menyelesaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi-kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat agar batik tetap diproduksi. Salah satu usaha Pemkab Bantul untuk menyemarakkan kembali usaha batik adalah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan pakaian batik digunakan sebagai seragam kantor dan sekolah. Akibatnya pasar baru mulai terbuka.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Dalam pasal 14 ayat 1 tentang Pakaian Kerja disebutkan bahwa salah satu pakaian kerja aparatur pemerintah Bantul ditetapkan menggunakan batik, yaitu pada hari Jum’at dan hari Sabtu.¹⁴ Setelah terjadi perubahan hari kerja menjadi lima hari maka batik digunakan untuk hari Kamis dan Jumat.

¹² *Tapih (jarik)* merupakan sejenis rok yang biasa digunakan oleh perempuan jawa.

¹³ Pengamatan (observasi) di Pasar Tradisional Pundhong Bantul (Minggu Wage, 20 Januari 2013) pukul 8.00 WIB.

¹⁴ Peraturan Bupati Bantul Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Sedangkan untuk guru yang harus bekerja enam hari maka pada hari sabtu juga mengenakan pakaian batik. Aturan ini mengandung pendisiplinan dalam bentuk sanksi bagi orang yang tidak mengikutinya. Bisa dibayangkan berapa tambahan permintaan batik, jika jumlah PNS di Bantul ada sekitar 12.703¹⁵ yang mana dalam seminggu mereka wajib mengenakan pakaian batik dua kali. Tidak hanya pegawai negeri, anjuran penggunaan seragam batik juga merambah ke sekolah-sekolah.

Kebijakan Pemkab Bantul ini dipengaruhi oleh keprihatinan akan nasib pedagang batik setelah terkena gempa dan juga banyaknya organisasi sosial yang mendampingi para pengrajin batik pasca gempa bumi. Sebagai bentuk dukungan pemerintah akan usaha masyarakat menghidupkan kembali batik maka keluarlah peraturan bupati bantul.

Ketentuan adanya pakaian wajib batik bagi pegawai mampu memacu produksi dan penjualan batik lokal Bantul. Akibat dari adanya permintaan batik yang tinggi setelah kebijakan tersebut, maka pada tahun 2007 muncul beberapa usaha produksi batik baru. Beberapa orang menangkap usaha baru tersebut sehingga muncullah usaha batik di delapan kecamatan. Beberapa usaha muncul di lokasi yang benar-benar baru, namun beberapa usaha bangkit kembali dari usahanya yang pernah "tidur".¹⁶

Pasar batik makin terbuka ketika Unesco pada tanggal 28 September 2009 menetapkan batik sebagai warisan dunia karena memiliki banyak simbol yang bertautan erat dengan status sosial, kebudayaan, alam, dan sejarah. Unesco menilai bahwa batik merupakan identitas bangsa Indonesia dan menjadi bagian penting seseorang di Indonesia sejak lahir hingga meninggal, dimana pada setiap tahap upacara dalam siklus kehidupan di gunakan batik dengan motif tertentu.¹⁷ Sebagai

¹⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, *Bantul Dalam Angka*, BPS Kab. Bantul, Bantul, 2008.

¹⁶ Perlu diberi catatan, menurut M. Noor Romadhon (2012; 12) ada beberapa usaha batik di Bantul yang kemunculannya sangat instant karena dimaksudkan sebagai wadah untuk mengambil dana dari lembaga-lembaga internasional yang memberikan bantuan pemberdayaan masyarakat pasca gempa yang terjadi di Bantul tahun 2006.

¹⁷ Sebagai contoh batik dengan motif truntum mangkoro digunakan orangtua pengantin ketika dilakukan upacara panggih pengantin, motif wahyu tumurun biasa digunakan ketika upacara mitoni, ataupun motif yuyu sekandang untuk acara siraman.

puncak pengakuan batik maka pada tanggal 2 Oktober 2009 di Paris, Unesco mengukuhkan batik sebagai warisan budaya dunia milik bangsa Indonesia. Tanggal itu kemudian diperingati sebagai hari batik, tidak hanya diperingati sebagai hari batik nasional, namun Unesco menetapkannya sebagai hari batik dunia.

Penghargaan Unesco teradap batik mempunyai efek turunan yang memicu perkembangan batik di Indonesia. Pemerintah pusat kemudian menindaklanjuti dengan membuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan baru tersebut batik dijadikan pakaian dinas di lingkungan Kementrian Dalam Negeri yang tidak hanya digunakan sekali dalam seminggu, namun digunakan setiap hari Kamis dan Jum'at. Setelah kementrian dalam negeri menetapkan kebijakan itu maka daerah-daerah di seluruh Indonesia juga menindaklanjuti dengan edaran yang sama. Gubernur Jawa Barat kemudian "membatikkan" pakaian seragam bagi setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Jawa Barat yang juga dipakai dua kali dalam seminggu. Kebijakan ini menggeser kebijakan sebelumnya yang hanya dilaksanakan seminggu sekali. Di Klaten juga terdapat usaha yang hampir sama untuk membangkitkan kembali kain lurik.

Penghargaan dari Unesco tersebut juga berdampak pada acara-acara televisi yang banyak memberitakan batik sebagai warisan budaya adiluhung dan mensekagamkan penyiarnya dengan pakaian batik. Para artis berame-rame menggunakan batik,¹⁸ akibatnya masyarakat penonton televisi juga berame-rame menirunya sehingga batik menjadi gaya hidup dan trend pakaian secara nasional.

Melihat sejarah tentang kejadian-kejadian yang mempengaruhi perkembangan batik tersebut maka kebijakan kewajiban penggunaan pakaian batik bagi pegawai di Bantul pada tahun 2007 termasuk trobosan karena pada saat itu belum ada daerah yang membuat produk hukum yang sama. Selain kebijakan tersebut Pemkab Bantul juga membuat kebijakan

¹⁸ Salah satu acara yangmana pembawa acaranya (artis) mengenakan pakaian batik adalah acara musik Dahsyat .

pendukung. Hal itu antara lain pameran batik bantul di Jakarta, pembangunan Pasar Seni Gabusan, penyelenggaraan Bantul Ekspo, peragaan busana batik dalam acara Taman Gabusan di TVRI, dan juga pemecahan rekor Muri terkait dengan batik. Secara lebih detail usaha Pemda Bantul untuk kembali menggairahkan perkembangan batik antara lain:

1. Pameran

Pameran merupakan kegiatan untuk memperlihatkan kepada masyarakat tentang produk yang dihasilkan. Dalam pameran, pengrajin diberi ruang untuk memperlihatkan produk yang ia buat, menjelaskan makna atau fungsi produk, bahkan sampai menjelaskan proses pembuatannya. Cara ini dilakukan oleh hampir semua pemerintah daerah di Indonesia. Kegiatan pameran batik Pemkab Bantul antara lain dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul ke Jakarta dalam acara Mahakarya Batik Bantul 2012 sebagai rangkaian kegiatan Pekan Batik Nusantara di Museum Tekstil Jakarta.¹⁹

2. Pasar Seni Gabusan dan Bantul Ekspo

Untuk pemasaran, para pengrajin batik di Bantul banyak yang membuka *showroom* di rumahnya masing-masing, seperti batik Ya Halwa di Jalan Bantul Km 8,5, batik Sarjuni/Jogo Pertiwi di tangga naik makam raja-raja Pajimatan Imogiri, batik Topo HP dan Dirjo Sugito di Pijenan, Pandak. Batik di *showroom-showroom* tersebut paling laris menjelang lebaran atau saat musim liburan sekolah tiba.

Pada tanggal 17 November 2004, Pemkab Bantul juga meresmikan Pasar Seni Gabusan (PSG) yang dimaksudkan sebagai sentra, miniature, tempat perdagangan, dan pusat informasi awal bagi produk-produk kerajinan yang banyak terdapat di Bantul (sekitar 8.015 unit usaha kerajinan), dimana salah satunya batik.²⁰ Setelah mendapat informasi awal, jika tertarik wisatawan dapat minta tolong pegawai PSG untuk menunjukkan lokasi masing-masing pengrajin. Pendirian PSG dilakukan karena belum ada satu pasar kerajinan yang lengkap di Bantul, seperti pasar Sukowati yang terdapat di Bali, ataupun pasar batik, seperti pasar

¹⁹ Antara News, *Batik Bantul Diperkenalkan di Museum Tekstil Jakarta*, Jumat, 30 November 2012.

²⁰ http://bantulbiz.com/id/berita_baca/idb-3.html.

Klewer di Surakarta, padahal di Bantul banyak sekali pengrajin. Selain memberi informasi langsung, PSG juga membuat website di <http://bantulcraft.com>. Setiap tahun, di lokasi Pasar Seni Gabusan juga diselenggarakan acara Bantul Ekspo dengan tujuan menunjukkan potensi dusun di seluruh Bantul kepada masyarakat luas. Para siswa di sekolah dasar “digiring” untuk turut menyaksikan keunikan dan kekayaan Bantul lewat acara ini.

3. Taman Gabusan sebagai Media Iklan.

Bantul mempunyai acara dialog rutin di TVRI Yogyakarta dengan nama Taman Gabusan. Selain menginformasikan kebijakan-kebijakan yang dibuat Pemkab Bantul, acara tersebut juga mensuguhkan kesenian-kesenian masyarakat dan peragaan busana yang menampilkan busana batik bantul. Selain TVRI, Pemkab Bantul juga bekerja sama dengan ANTV untuk memamerkan potensi batik bantul lewat acara pemecahan rekor Muri membatik terbanyak dan terpanjang pada tanggal 20 Maret 2010 di Pasar Seni Gabusan yang melibatkan 2.150 siswa sekolah se-Bantul di kain sepanjang 2.000 meter.²¹

4. Buku Batik Bantul

Dalam bidang pemasaran, penumbuhan *brand image*, *branding*, atau *positioning* menjadi sangat penting untuk memperluas pasar. Dalam pemasaran diperlukan usaha untuk menggerakkan merek menjadi ikon. Untuk mencapainya diperlukan penciptaan mitos yang dibangkitkan lewat pencitraan yang mencirikan suatu produk (M. Gunawan Alif, 2010: 38). Merujuk pada buku S.K. Sewan Susanto (1980) yang mendeskripsikan batik di Indonesia, nama batik bantul atau batik bantulan belum ada, padahal di buku tersebut telah ada batik ponorogo, batik tasikmalaya, batik Mojokerto, batik Sidharjo, batik Wonogiren yang masing-masing punya karakter unik.²² Oleh karena itu diperlukan proses *iconic brand* dengan menonjolkan dan memberi beda pada karakter batik bantul. Jika batik bantul telah “kondang” maka orang akan mewajibkan dirinya untuk membeli batik bantul sebagai oleh-oleh. Wisatawan akan merasa berdosa jika

²¹ www.bantulcraft.com/berita.php?baca=41

²² Misalnya batik Wonogiren, punya ciri terdapat guratan-guratan dalam garis batik yang lahir dari proses lilin yang mengalami pecah-pecah halus.

ke Bantul tanpa membawa oleh-oleh batik khasnya. Untuk mencapai hal itu Pemkab Bantul membuat promosi dengan membukukan corak dan motif batik bantul lewat buku yang berjudul *Batik Bantul*.

E. Memperteguh Keahlian: Batik Sebagai Muatan Lokal

Cukup ironi jika pasar batik terbuka lebar, namun tidak lagi banyak orang Bantul yang punya keahlian membatik. Hal ini akan memunculkan masalah baru, seperti serbuan batik dari Cina, padahal batik telah diakui dunia sebagai produk budaya bangsa Indonesia.

Selain mempunyai keindahan akan corak dan warnanya, kain batik mengandung nilai-nilai filosofis yang sarat akan muatan pendidikan, etika, estetika, dan memiliki makna simbolik dalam tata hidup manusia. Dan warisan budaya ini merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain. Oleh karena itu selain membuka pasar diperlukan juga usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian masyarakat tentang batik.

Kebutuhan tersebut direspon oleh Pemkab Bantul dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bantul No. 05 A tahun 2010 tentang Penetapan Membatik sebagai Muatan Lokal Wajib di Kabupaten Bantul yang dimulai pada tahun 2011. Penetapan pelajaran membatik sebagai muatan lokal wajib Kabupaten Bantul menunjukkan apresiasi yang cepat dari pemkab untuk menjawab persoalan batik dikemudian hari.

Kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan adanya Pokja Kearifan Lokal dan Hak Anak yang telah berhasil menyusun dan membukukan kurikulum dan silabus pendidikan batik sebelum dilaksanakan pada tahun 2011 (Mujiasih, dkk, 2010). Dengan demikian, saat ini semua siswa sekolah dasar di Bantul punya kualifikasi mampu membatik. Proses pendidikan batik yang sistematis ini merupakan terobosan pertama kali di Indonesia.

Pendidikan batik sejak dini juga penting untuk menumbuhkan kecintaan pada produk mereka sendiri. Ada semangat berdikari dalam pelajaran membatik. Mereka bisa membuat sapu tangan, taplak meja, bahkan baju seragam sendiri tanpa tergantung dari pabrik tekstil impor. Batik memberikan penyadaran bahwa mereka bisa membuat karya untuk mereka sendiri sehingga tidak mengalami

ketergantungan dengan pabrik. Meskipun demikian perlu dipahami bahwa batik adalah sebuah produk seni sehingga dengan dijadikannya batik sebagai pelajaran muatan lokal wajib harusnya tidak menjadi beban siswa, bagaimanapun batik adalah seni yang membutuhkan ketertarikan, kecintaan, dan bakat anak.

F. Kesimpulan

Batik dalam tekanan. Hal ini terjadi karena perubahan sosial kebudayaan yang telah melabrak dan menggeser batik yang dahulu digunakan sebagai pakaian sehari-hari mulai ditinggalkan masyarakat. Akibatnya pengrajin batik kurang sejahtera karena menurunnya permintaan batik. Namun demikian persoalan tersebut dapat diatasi lewat sentuhan kebijakan.

Bupati Bantul mengeluarkan kebijakan Nomor 02 Tahun 2007 yang mempunyai kekuatan memaksa sehingga batik kembali digunakan sebagai pakaian seragam (sehari-hari). Selain itu Pemkab Bantul juga menjadikan pelajaran batik sebagai pelajaran wajib di sekolah dan juga mengeluarkan buku tentang Batik Bantul. Usaha-usaha tersebut dilakukan sebagai *branding* agar batik bantul menjadi ikon kerajinan yang wajib dimiliki wisatawan ketika berkunjung ke Bantul. Usaha ini terbantu dengan pengakuan Unesco yang menjadikan batik indonesia sebagai *world heritage*.

Dilihat dari sifatnya, kebijakan terkait batik di Bantul bersifat responsif yang berdampak pada peningkatan usaha dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah produksi, jumlah pengusaha, dan juga jumlah pengrajin batik di Bantul. Masyarakat batik senang dengan kebijakan-kebijakan yang diambil Pemkab Bantul sehingga menganugrahi Sri Surya Widati (Bupati Bantul) sebagai Ibu Batik Bantul. Kebijakan terkait dengan batik di Bantul juga tidak melahirkan pengusaha birokrat batik yang berdiri, memonopoli, dan mengambil manfaat atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan cara kolusi serta nepotisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News, *Batik Bantul Diperkenalkan di Museum Tekstil Jakarta*, Jumat, 30 November 2012.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, *Bantul Dalam Angka*, BPS Kab. Bantul, Bantul, 2008.
- Edi Soeharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Hempri Suyatna, *Dominasi Elit Lokal Dalam Arena Pengembangan Industri Kecil Di Era Desentralisasi (Studi Kabupaten Banaran Provinsi Mataram)*, Ringkasan Disertasi, Program Doktor Sosiologi UGM, Yogyakarta, 2012.
- M. Gunawan Alif, *Beyond Brand Building: Menciptakan Merek Menjadi Ikon*, dalam *Majalah Desain Grafis*, Vol 06, Edisi 36 2010.
- M. Noor Romadlon, *Art (Batik) Under Pressure* dalam *Jurnal Riset Daerah*, Edisi Khusus Vol. I, No.1, Desember Tahun 2012.
- Mahendra Wijaya, *Ekonomi Komersial Ganda: Perkembangan Kompleksitas Jaringan Sosial Ekonomi Perbatasan di Surakarta*, UNS Press, Surakarta, 2011.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998.
- Mujiasih, dkk. *Kurikulum Dan Silabus Pendidikan Batik: Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah*, Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul-Yudistira, Yogyakarta, 2010.
- Nurhadiantomo, *Konflik-Konflik Sosial Pri dan Non Pri dan Hukum Keadilan Sosial*, UMS Press, Surakarta, 2004.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 02 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Pelaksanaan Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul*.
- PIKM DIY (Proyek Pengembangan Industri Kecil dan Menengah), *Katalog Batik Khas Yogyakarta*, Kanwi Dept./ Dinas Perindustrian Propinsi DIY, Yogyakarta, 1996, hal

3).

Richard Robinson dan Vedi R. Hadiz, *Oligarki dan Kapitalisme Kasus Indonesia dalam Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*, LP3ES, Jakarta, 2005.

Riyantono, dkk, *Batik Bantul*, Pemerintah Daerah Kab. Bantul, 2010)

S.K. Sewan Susanto, *Seni Kerajinan Batik Indonesia*, Balai Penelitian Batik dan Kerajinan, Lembaga Penelitian dan Pendidikan Industri, Departemen Perindustrian RI, Jakarta, 1980.

Surat Keputusan Bupati Bantul No. 05 A tahun 2010 tentang Penetapan Membatik sebagai Muatan Lokal Wajib di Kabupaten Bantul

Tim Sanggar Batik Barcode, *Batik: Mengenal Batik dan Cara Mudah Membuat Batik*, Kata Buku, Jakarta, 2010.

Yahya A. Muhaimin, *Bisnis dan Politik, Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, LP3ES, Jakarta, 1991.

Data Internet:

www.bantulkab.go.id, *PAD Tahun 2009: Data Pokok Pembangunan Ekonomi dan Keuangan*, http://www.bantulkab.go.id/datapokok/1004_pad.html, diunduh 11 Januari 2013.

www.bantulkab.go.id, *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Bantul*, <http://www.bantulkab.go.id/berita/1638.html>, diunduh 11 Januari 2013.

Cungki Kusdarjito, *Program Pengentasan Kemiskinan*, 30 Mei 2007. <http://www.forplid.net/studi-kasus/8-kepemimpinan-kepemimpinan-/119-program-pengentasan-kemiskinan-.pdf>.

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>.

www.bantulcraft.com, *2150 Siswa Sekolah Se-Bantul Membatik Masuk Muri* <http://www.bantulcraft.com/berita.php?baca=41>.